

Al-A'raf

Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat

Diterbitkan oleh Jurusan Tafsir Hadis dan Akidah Filsafat IAIN Surakarta

Penanggung Jawab

Abdul Matin Bin Salman (Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah)

Pemimpin Redaksi

Nurisman

Sekretaris Redaksi

Tsalis Muttaqin

Dewan Redaksi

Islah Gusmian

Ari Hikmawati

Tsalis Muttaqin

Waryunah Irmawati

Siti Nurlaili Muhadiyahatiningsih

Kasmuri

Syamsul Bakri

Redaktur Ahli

Mark Woodward (Arizona State University, Tempe, USA)

Mahmoud Ayoub (Hatford Theological Seminary, Connecticut, USA)

Florian Pohl (Emory University, Georgia, USA)

Nashruddin Baidan (STAIN Surakarta)

Damarjati Supadjar (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)

Tata Usaha

Heny Sayekti Puji Lestari

Gunawan Bagdiono

Alamat Redaksi:

Sekretariat Fakultas Ushuludin dan Dakwah IAIN Surakarta

Jl. Pandawa, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo (0271) 781516

Email: jurnal.usnuluddinsolo@gmail.com

Redaksi menerima tulisan ilmiah dari kalangan manapun tanpa mesti sejalan dengan pandangan redaksi. Redaksi berhak menyunting, dan menyempurnakan naskah tulisan yang diterima tanpa mengubah substansinya. Adapun isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Naskah tulisan berkisar sekitar 15-20 halaman kuarto dengan spasi ganda dalam bentuk disket dan *print out*-nya. Naskah disertai abstrak dalam bahasa asing (Arab atau Inggris).

FENOMENA SEKULARISME

Kasmuri

A. Pendahuluan

Belakangan ini teori sekularisasi kembali ramai digugat terkait dengan meningkatnya pengaruh politik gerakan-gerakan keagamaan di banyak tempat, seperti Kristen Kanan di Amerika Utara, fundamentalisme Yahudi di Israel, fundamentalisme Hindu di India, dan fundamentalisme Islam di banyak negara, termasuk di Eropa. Hal itu juga terkait dengan makin meningkatnya minat orang kepada berbagai jenis spiritualitas, seperti *New Age*, yang berbeda dari bentuk-bentuk lama agama formal. Semua perkembangan ini tidak saja menggerogoti asumsi-asumsi pokok teori sekularisasi, yang menujumkan makin merosotnya peran agama di era modern ini, tapi juga rumusan lama tentang pemisahan gereja dan negara.

Ini adalah momen-momen di mana, “kewajiban kewarganegaraan” makin bergesekan dengan “tuntutan iman”. Itulah momen-momen ketika orang-orang, berusaha menyeimbangkan “komitmen keagamaan” mereka dan “penalaran sekular” mereka. Para ilmuwan sosial terpecah-pecah dalam hal apakah proses sekularisasi mengurangi peran agama dalam kehidupan sehari-hari atau apakah keyakinan-keyakinan keagamaan besar dunia sedang mengalami kebangkitan besar. Untungnya, sekumpulan besar bukti-bukti tentang faktor-faktor dasar yang mendorong religiusitas di dunia belakangan ini mulai tersedia.

B. Sekularisme (Pengertian dan Perkembangannya)

Pengertian Sekularisme Secara etimologi sekularisme berasal dari kata *saeculum* (bahasa latin), mempunyai arti dengan dua konotasi waktu dan ruang: waktu menunjukkan kepada pengertian sekarang” atau kini”, dan ruang menunjuk kepada pengertian „dunia” atau „duniawi”. Sekularisme juga memiliki arti *fashluddin ‘anil haya* yaitu memisahkan peranan agama dari kehidupan, yang berarti bahwa agama hanya mengurus hubungan antara individu dan penciptanya saja.¹

¹Syed Naquib Al Attas, *Islam dan Sekularisme*, (Bandung:Pustaka, 1981), Hal.18-19

Maka sekularisme secara bahasa bisa diartikan sebagai faham yang hanya melihat kepada kehidupan saat ini saja dan di dunia ini. Tanpa ada perhatian sama sekali kepada hal-hal yang bersifat spiritual seperti adanya kehidupan setelah kematian yang nota bene adalah inti dari ajaran agama.²

Sekularisme secara terminologi sering didefinisikan sebagai sebuah konsep yang memisahkan antara negara (politik) dan agama (*state and religion*). Yaitu, bahwa negara merupakan lembaga yang mengurus tatanan hidup yang bersifat duniawi dan tidak adahubungannya dengan yang berbau akhirat, sedangkan agama adalah lembaga yang hanya mengatur hubungan manusia dengan hal-hal yang bersifat metafisis dan bersifat spiritual, seperti hubungan manusia dengan tuhan. Maka, menurut paham sekular, negara dan agama yang dianggap masing-masing mempunyai kutub yang berbeda tidak bisa disatukan. Masing-masing haruslah berada pada jalurnya sendiri-sendiri.

Holyoake menggunakan istilah sekularisme untuk menjelaskan pandangannya yang mendukung tatanan sosial terpisah dari agama, tanpa merendahkan atau mengkritik sebuah kepercayaan beragama. Holyoake berpendapat bahwa "*Secularism is an ethical system founded on the principle of natural morality and independent of revealed religion or supernaturalism.*"³ Definisi yang diberikan Holyoake bahwa sekularisme adalah suatu sistem etik yang didasarkan pada prinsip moral alamiah dan terlepas dari agama wahyu atau supranaturalis tersebut dapat ditafsirkan secara lebih luas, bahwa sekularisme dapat menunjang kebebasan beragama, dan kebebasan dari pemaksaan kepercayaan dengan menyediakan sebuah rangka yang netral dalam masalah kepercayaan, serta tidak menganak emaskan sebuah agama tertentu. Artinya, perdebatan mengenai sekularisme tidak lagi menyentuh label dan kemasan, tapi menyentuh isi dan substansi.

Di Barat (Eropa) pada abad ke-19 terjadi secara intensif pemisahan antar hal-hal yang menyangkut agama dan non agama yang kemudian disebut "sekularisme". Sedikit demi sedikit urusan ke duniawian memperoleh kemerdekaan dari pengaruh Gereja (terutama Gereja Protestan), dengan puncaknya di mana Gereja tidak berhak campur tangan dalam bidang politik, ekonomi dan ilmu

²Taqiyuddin An-Nabhani, *Peraturan Hidup dalam Islam*, (Bogor: Pustaka Tariqul Izzah, 2001), hal.41

³Sekularisme adalah suatu sistem etik yang didasarkan pada prinsip moral alamiah dan terlepas dari agama-wahyu atau supranaturalisme"

pengetahuan.⁴Pengertian ini, kemudian memicu polemik untuk tidak mengatakan pertentangan antara urusan agama dan non-agama, atau “sekular”. Tetapi, walaupun definisi umum yang populer seperti itu, dalam perjalanan sejarah konseptualnya, pengertian sekularisme sebagai konsep pun terus mengalami perkembangan bahkan perubahan sejalan dengan arus modernisasi yang terjadi di masyarakat Barat, dan kemudian mempengaruhi seluruh dunia. Dua istilah ini kemudian populer dengan “sekularisasi” dan “sekularisme”.

Sekularisasi diartikan sebagai pemisahan antara urusan negara, atau lebih luas politik, dan urusan agama; atau pemisahan antara urusan duniawi dan akhirat. Sekularisasi sebagaimana telah berkembang dalam sejarah menunjukkan arah perubahan atau pergeseran dari hal-hal yang bersifat adikodrati, teologis menjadi hal-hal yang bersifat alamiah (kodrati) dan ilmu pengetahuan. Sekularisasi adalah suatu kecenderungan melihat permasalahan dari sudut duniawi dan kekinian, dengan cara-cara yang rasional, maupun empiris, seperti ditunjukkan oleh ilmu pengetahuan.

Maka, dilihat dari sudut ilmu pengetahuan, sekularisasi berarti pembebasan manusia dari agama dan metafisika; atau tepatnya, terlepasnya dunia dari pengertian-pengertian religius yang suci, non rasional, apalagi pandangan yang bersifat mistis. Dari pembebasan ini, manusia pun mengalihkan perhatiannya ke arah dunia sini dan waktu kini terutama melalui ilmu pengetahuan.

Akibat dari proses sekularisasi ini, maka dengan sendirinya masyarakat semakin lama semakin terbebaskan dari nilai-nilai keagamaan atau spiritual, termasuk bebas dari pandangan metafisis yang tertutup. Akibat dari proses sekularisasi, secara umum terjadilah diferensiasi nilai-nilai religius. Diferensiasi yang berkembang antara komunitas sosial dan komunitas religius pada akhirnya memunculkan anugerah kehidupan yang sekular, dengan suatu tatanan legitimasi religius yang baru.

Menurut Robert N. Bellah, proses diferensiasi ini diterima sebagai dasar konsep “*civil religion*” di Amerika. Ia sendiri lebih suka memandangnya sebagai suatu dimensi religius yang ada di sepanjang konsepsi-konsepsi tersebut, sebagai “*way of life*” orang Amerika. Bellah mencatat: “Walaupun masalah-masalah kepercayaan religius yang personal, peribadatan dan asosiasi, tegasnya dianggap sebagai masalah-

⁴Faisal Ismail, “Tentang Sekular, Sekularisme dan Sekularisasi” dalam *Percikan Pemikiran Islam* (Yogyakarta: Bina Usaha, 1984), h.10

masalah pribadi, pada saat yang sama, terdapat unsur-unsur orientasi religius yang umum dan tertentu yang diberi oleh mayoritas besar orang Amerika (mereka) menetapkan suatu dimensi religius bagi seluruh struktur kehidupan religius. Dimensi religius public diungkapkan dalam seperangkat kepercayaan, simbol-simbol dan ritual-ritual yang saya sebut *civil religion* orang Amerika.⁵

Proses diferensiasi sebagaimana diuraikan oleh Bellah ini dapat membantu proses pemaknaan wilayah agama dalam pengertiannya yang longgar, di mana agama dapat melangsungkan eksistensinya dalam ruang publik atau meminjam istilah Bellah di atas *civil religion*⁶, tanpa harus memandangnya sebagai seperangkat aturan-aturan atau nilai-nilai yang dapat menggiring pada pemahaman yang eksklusif dan dogmatis. Salah satu kekhasan *civil religion* ini adalah membebaskan dari formalisme kosong, dan berlaku sebagai suatu wadah pemahaman diri religius nasional yang murni. Dari uraian ini, dapat disimpulkan bahwa sekularisasi dimaksudkan sebagai pemisahan secara relatif antara yang profan dan yang sacral dalam hubungannya dengan ruang publik.

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Timbulnya Sekularisme

Pendiri sekularisme adalah George Jacob Holyoake kelahiran Birmingham Inggris, anak pekerja kasar.⁷ Kendatipun pada mulanya berpendidikan agama, kehidupan remajanya yang diliputi dan ditempa oleh situasi sosial politik di tempat kelahirannya yang keras, sikap Holyoake berubah, dan akhirnya ia kembali terkenal karena sekularismenya. Perlu dicatat bahwa pada mulanya, sekularisme ini belum berupa aliran etika dan filsafat, melainkan hanya merupakan gerakan protes sosial dan politik.⁸

Sekularisme pertama kali muncul di Eropa. Tapi mulai diperhitungkan keberadaannya secara politis bersamaan dengan lahirnya revolusi Perancis tahun 1789 M. berkembang merata ke

⁵Robert N. Bellah, *Beyond Belief (Menemukan Kembali Agama)*, (Jakarta:Paramadina,2000), hal 237-270

⁶Istilah *civil religion* pernah menjadi diskursus dalam mencari bentuk sekularisme, atau hubungan agama dan negara di Indonesia pada era 1990-an, khususnya ketika Nurcholish Madjid mengintrodusir istilah *civil religion* ini, dan menegaskan fungsi Pancasila sebagai *civilreligion* di Indonesia

⁷Juhaya S. Praja, *Aliran-aliran Filsafat dan Etika*, (Jakarta: Kencana, cet.IV, 2010), h.188.

⁸M. Solihin, *Perkembangan Pemikiran Filsafat dari Klasik hingga Modern*, Bandung:CV. Pustaka Setia, 2007, hal. 246-247.

seluruh Eropa pada abad ke-19 M. kemudian tersebar lebih luas lagi ke berbagai negara di dunia, terutama dalam bidang politik dan pemerintahan, yang pada abad ke-20 M, dibawa oleh penjajah dan missionaris Kristen.⁹

Muhammad Al-Bahy menjelaskan bahwa yang menimbulkan munculnya sekularisme adalah sebagai berikut :

1. Terjadinya sekularisme pada abad ke-17 dan ke-18 adalah perebutan kekuasaan antara negara dan Gereja. Karena itu, pemisahan antara kedua kekuasaan itu adalah penanggulangan perselisihan baik secara legal atau filosofis.
2. Yang mendorong sekularisme abad ke-19 adalah pembentukan kekuasaan. Karena itu, pengertian sekularisme tidak sama dengan paham pemisahan antara Gereja dan negara, akan tetapi semacam penghapusan paham dualisme dengan penghancuran agama sebagai awal mula untuk mencapai kekuasaan tersendiri, yaitu “kelompok Buruh” atau “sosial” atau “negara” atau “partai”.
3. Penelitian terhadap alam dan kemajuan ilmu pengetahuan telah memberanikan kaum intelek sekuler untuk keluar dari wasiat atau dogma Gereja¹⁰.

Sedangkan Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan, bahwa sebab-sebab kemunculan sekularisme di dunia Barat Masehi dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: faktor agama, pemikiran, psikologi, sejarah dan realitas kehidupan empiris. Yaitu (1) Bahwa agama *Masehi menerima dikotomi kehidupan antara Tuhan dan Kaisar*. Sesungguhnya di dalam agama Masehi terdapat dalil-dalil yang mendukung ajaran sekularisme, atau pemisahan agama dan negara, ataupun antara pemerintahan spiritual dan pemerintahan dunia. Masehi mengakui dualisme kehidupan ini, ia membagi kehidupan itu menjadi dua bagian. Pertama, kehidupan untuk Kaisar dari satu pihak, yang tunduk kepada pemerintahan duniawi, atau pemerintahan negara. Kedua, kehidupan untuk Tuhan dari pihak lain, yang tunduk kepada kekuasaan spritual, yaitu berada dibawah pemerintahan Gereja.

Pembagian ini tergambar dengan jelas dalam perkataan Al-Masih a.s. seperti yang diriwayatkan oleh Injil: “berikanlah Kaisar apa yang menjadi haknya, dan berikan pula kepada Tuhan apa yang menjadi

⁹ Lembaga Pengakajian dan Penelitian WAMI, *Gerakan Keagamaan dan Pemikiran (Akar Ideologis dan Penyebarannya)*, Jakarta:Al-Ishlahy Press, cet.I, 1995, h.286

¹⁰ Pardoyo, *Sekularisasi dalam Polemik*, Jakarta:Pustaka Utama Grafiti, cet.I, 1993, h. 37.

haknya”. (2) *Agama Masehi tidak memiliki perundang-undangan bagi masalah kehidupan*. Dari sisi lain, Masehi tidak memiliki perundang-undangan tersendiri bagi masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan, yaitu perundang-undangan yang berfungsi untuk memantapkan berbagai bentuk interaksi di dalam kehidupan, mengatur hubungan yang ada di dalamnya, dan meletakkan dasar-dasar standar tertentu yang adil untuk segala aktivitas dalam kehidupan. Agama Masehi hanya memiliki konsep spiritual dan akhlak, yang dimuat di dalam nasehat-nasehat Injil dan dalam perkataan-perkataan Al-Masih. (3) *Kekuasaan Agama Masehi*. Bagi sekularisme, apabila ia memisahkan agama Masehi dari negaranya atau memisahkan negaranya dari agamanya, pada dasarnya ia tidak menghilangkan agamanya dan tidak pula mengisolasi kekuasaannya. Sebab, agamanya memiliki kekuasaan tersendiri yang tegak berdiri. Ia mempunyai kekuatan, kedudukan, finansial, dan tokoh-tokoh agama. Dengan demikian terdapat dua kekuasaan di dalam Masehi, yaitu kekuasaan agama, yang dijalankan oleh pendeta dan tokoh “Akliurus”, dan juga kekuasaan duniawi, yang dijalankan oleh raja maupun presiden serta para tokoh dan pembantu-pembantu pemerintahan. (4). *Sejarah Gereja*, Sesungguhnya sejarah hubungan gereja dengan ilmu, pemikiran dan kebebasan adalah sebuah sejarah yang menakutkan. Gereja pernah berada dalam kebodohan yang memusuh ilmu pengetahuan, ia juga pernah bergelut dengan khurafat sehingga menentang pemikiran, juga pernah bertindak sewenang-wenang dan menentang kebebasan, pernah berkonspirasi dengan kaum feodalistik menentang rakyat sehingga rakyat pun bangkit melakukan revolusi terhadapnya. Mereka menuntut kebebasan dari para petinggi pemerintahan secara langsung, dan mereka pun menganggap bahwa pengisolasian agama dari negara adalah sebuah upaya bagi rakyat di dalam menentang keterkungkungan mereka.¹¹

Periodisasi Sekularisme

Untuk lebih memudahkan pemahaman mengenai perkembangan permasalahan tentang sekularisasi dalam kerangka pemikiran kefilosofan di Eropa, secara garis besar Muhammad Al-Bahy membagi dua periode sekularisme yaitu : (1). Periode pertama, periode sekularisme moderat yaitu antara abad ke-17 dan ke-18 dan (2). Periode

¹¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Islam dan Sekularisme diterjemahkan dari buku: Al-Islam wal Ilma'niyah wajhan lil wajhin*, (Bandung:Pustaka Setia, cet.I, 2006), hlm. 69-75

kedua, periode sekularisme ekstrem, yaitu yang berkembang pada abad ke-19

- *Periode sekularisme moderat*

Pada periode sekularisme moderat, agama dianggap sebagai masalah individu yang tidak ada hubungannya dengan negara, tetapi meskipun demikian, negara masih berkewajiban untuk memelihara gereja, khususnya bidang upeti atau pajak. Dalam pengertian ini, dalam pemisahan antara negara dan gereja, tidak dirampas agama Masehi sebagai agama sekaligus dengan nilai-nilai yang dimilikinya, meskipun ada sebagian ajarannya yang diingkari, dan menuntut penundukan ajaran-ajaran agama Masehi kepada akal, prinsip-prinsip alam, dan perkembangannya. Penganut pendapat demikian dikenal dengan penganut aliran “Deisme” yang mengakui adanya Tuhan sebagai asal muasal alam, akan tetapi mengingkari adanya mukjizat, wahyu dan menggolongkan Tuhan kedalam “alam”; Tuhan menyerahkan alam kepada nasibnya sendiri. Diantara para penganut aliran ini terdapat: Nama (1) Francois Voiltare (1694-1778), filsuf Perancis yang digolongkan sebagai penganut agama alami (2). Lessing (1729-1781) , filsuf Jerman yang berpendapat bahwa agama bukanlah terminal terakhir, melainkan sebagai periode batu loncatan menuju kehidupan manusia. Agama berstatus sebagai medan perkembangan. Tuhan bermaksud memberikan petunjuk manusia kepada kebenaran, sedang kebenaran abadi tidak ada, yang ada hanyalah usaha menuju kepada kebenaran. Filsuf-filsuf lain yang termasuk dalam periode sekularisme moderat antara lain : (1). John Locke (1632-1704), filsuf Inggris yang berpendapat bahwa negara yang modern telah menghapuskan semua wasiat Gereja. Karena memandang kepercayaan agama sebagai hasil pemikiran perorangan, dan persaudaraan dalam agama sebagai hubungan bebas yang harus dipikul dan dipertahankan selama tidak mengancam kebinasaan dan kehancuran undang-undang negara.(2). G.W. Leibniz (1646-1716), filsuf Jerman. Ia sependapat dengan Locke, bahwa agama menjadi masalah perorangan yang hanya berurusan dengan individu saja tanpa ada suatu hubungan dengan negara. Bahkan dialah yang menganjurkan penghapusan sebagian ajaran agama Masehi yang tidak sesuai dengan akal. (3). Thomas Hobbes (1588-1679), filsuf Inggris yang berpendapat bahwa negara itu merupakan “akad” atau kesepakatan dimana negara berkewajiban menggiring manusia secara paksa ke dalam akad tersebut. Karena itulah Hobbes

menekankan pentingnya kewajiban negara. Ia menjadikan negara sebagai sumber undang-undang, moral dan agama. Bahkan untuk pemeliharaan kekuatan dan kewibawaan negara, dianjurkan agar negara berbuat sesuai dengan apa yang disenangai atau dikehendakinya.(4). David Hume (171-1776), filsuf Inggris yang atheis. Ia mengingkari adanya roh yang kekal, tetapi tetap menganggap agama sebagai kepercayaan, agama menurut pandangannya bukanlah suatu ilmu tetapi hanya institusi belaka. (5). J.J. Rousseau (1712-1778), filsuf Perancis dan seorang humanis non materialis. Dalam buku *Emil*, Rousseau memfokuskan alam sebagai faktor pemisah sebagaimana ia menjadikan agama dalam pendidikan merupakan suatu hal yang bertentangan dengan alam. Menurut pendapatnya, sebaiknya anak tidak boleh mengikuti golongan agamis, tetapi anak memilih sendiri berdasarkan atas akal murninya. Rousseau tidak menerima paham ateisme, tetapi ia juga menolak bukti-bukti metafisis tentang adanya Tuhan yang diajarkan ilmu ketuhanan Gereja.

Pokok pemikiran yang mendorong adanya pemisahan antara Gereja dan negara, atau antara agama dan negara, pada sekularisme periode pertama ini yaitu: Keutamaan untuk menciptakan kewibawaan negara dengan kewibawaan yang mutlak, dalam rangka menghadapi kekuasaan Gereja, beserta wasiat-wasiatnya yang telah diberikan kepada manusia sejak abad pertengahan, sebagaimana pendapat Hobbes Tuduhan terhadap agama Masehi dengan ajaran-ajarannya yang jauh dari akal sehat – seperti kepercayaan tentang Trinitas, kepercayaan tentang tabiat Tuhan dan manusia yang dimiliki Al-Masih; sebagaimana pendapat Locke dan Leibniz, yaitu dalam usahanya membersihkan agama Masehi berdasarkan logika akal sehat. Menurut ilmu pendidikan, agama bertentangan dengan “alam”, seperti yang diutarakan Rousseau berdasarkan ajaran-ajaran agama Masehi yang berupa dosa turunan. Anggapan bahwa agama itu suatu perkembangan, bukan tujuan terakhir, dengan demikian kebenarannya adalah kebenaran yang dapat berubah, sebagaimana pendapat Lessing.

- *Periode Sekularisme Ekstrem*

Jika pada periode sekularisme moderat, agama masih diberi tempat dalam suatu negara, maka pada sekularisme ekstrem, agama tidak hanya menjadi urusan pribadi, akan tetapi justeru negara memusuhi agama, begitu pula negara memusuhi orang-orang yang beragama. Periode kedua, atau periode sekularisme ekstrem pada

abad ke-19 dan 20 ini merupakan periode materialisme atau disebut sebagai *Revolusi Sekuler*.

Filsuf-filsuf yang termasuk dalam periode sekularisme ekstrem antara lain ialah : (1) Ludwig Feurbach (1804-1872), filsuf Jerman dan termasuk pencetus revolusi sekuler terpenting pada abad ke-19. Menurut pendapatnya, manusia dapat mengkaji periode perpindahan dari agama alamiah yang bersih dan jauh dari pengaruh agama langit menuju materialisme ekstrem. Manusia itu merupakan wujud Tuhan tetapi bukan Allah, dan agama yang baru adalah politik, bukan agama Masehi. Karena itu politik harus dijadikan agama. Allah dan agama keduanya bukanlah dasar negara, tetapi dasarnya adalah manusia dan kebutuhan. Dengan demikian negara adalah kandungan semua kenyataan, yakni alam keseluruhan atau kemanusiaan yang memelihara kenyataan manusia. Dengan begitu agama menjadi musuh negara, dan “ateis praktis ada berkaitan dengan negara”. (2) Karl Marx (1818-1883), juga seorang filsuf Jerman yang amat dekat dengan kawannya, Engels, sehingga beberapa pandangannya pun merupakan buah pikiran bersama. Marx seorang Revolusioner. Ada tiga prinsip pandangan Marx tentang materi: (a) Prinsip yang menghidupkan perkembangan secara terus menerus, (b) Prinsip menghilangkan kontradiksi (c) Prinsip kemajuan untuk menghasilkan sesuatu yang baru, walaupun tidak lebih baik.

Marx dianggap revolusioner, dan bukan filsuf, karena filsafatnya sebagai alat untuk menuju politik. Secara garis besar pandangan Marx dan Engels adalah sebagai berikut : (a) Materialisme historis dialektis (b) Anti-Tuhan dan menggunakan metode ilmiah dalam mencari bukti kebenarannya (c) Memerangi sistem kelas manusia, untuk mencapai kelas masyarakat yang tidak berkelas.

Lenin (1870-1924), orang yang mempraktekan marxisme. Ia mengubah marxisme menjadi akidah bagi partai (golongan) yang kemudian marxisme disebut *Bolsjewisme* di dunia politik, atau dikenal sebagai materialisme produktif dalam dunia filsafat. Dengan demikian, Bolsjewisme nampak sebagai “agama baru” sebagai pengganti dari “agama masehi”. Menurut Lenin, agama itu candu rakyat, yang menutup kemajuan berfikir. Meskipun Lenin setuju dengan pendapat bahwa “agama itu urusan perorangan”, akan tetapi untuk partai (golongan), anggotanya harus anti-Tuhan, karena anggotanya yang masih beragama menjadi musuh

bebuyutan bangsa. Negara harus netral, dalam arti negara tidak memperhatikan agama, tidak ada hubungannya dengan agama. Agama tidak ada nilainya bagi penduduk, maka tidak perlu menanyakan aliran agama, dan kenetralan terhadap agama itulah pemisah sempurna antara negara dan Gereja.

Beberapa pokok pikiran yang dapat diambil dari periode sekularisme ekstrem ialah (1) Sekularisme Feuerbach mencerminkan aliran *humanisme* yang anti-Tuhan dan menghendaki permusuhan agama. Bukan lagi pemisahan antara agama dan negara sebagaimana pada periode pertama, dan ia menghendaki penempatan perkumpulan buruh pada proposisi Tuhan dalam ibadah. (2) Sekularisme Marx merupakan *materialisme historis ateis*, yang bertujuan untuk menghancurkan agama sebagai permulaan penting berdirinya alam, dimana manusia merupakan pemilik dirinya dan kewibawaan sosial dan negara, dan posisi pembentukan (sosial dan negara) terhadap individu sebagai Tuhan yang disembah oleh individu-individu para pemilik (3) Sekularisme Lenin berakhir dengan permusuhan agama Masehi sebagai agama, dan pembentukan *Bolsjewisme*, dan agama baru ini harus mewujudkan alam nyata yaitu “golongan” atau “partai”.¹²

a. Sekularisme Di Indonesia

Di Indonesia negara sekuler dipahami dalam tiga tahapan. *Pertama*, negara yang memisahkan agama dan politik (negara), yang mana negara tidak boleh ikut campur terhadap persoalan agama. Jadi konsep agama menjadi wilayah pribadi dalam masyarakat. *Kedua*, dalam pengertian bahwa negara sekuler adalah negara dimana masyarakatnya menjadikan wilayah dunia seperti politik dipandang dan disikapi secara dunia dan tidak disikapi secara sacral dan hal ini bersifat social. *Ketiga*, pengertian terbaru sebagaimana dipahami oleh Abdullah Ahmed A. menurutnya dalam praktik politik terkini, negara sekuler sesungguhnya adalah negara dimana masyarakatnya berada dalam kondisi menegosiasikan hubungan antara agama dan negara dari pada menyisihkan agama dari ruang publik masyarakat secara *rigid*.

Kuntowijoyo seorang pemikir Muslim dan ahli sejarah Universitas Gadjah Mada berpendapat bahwa Pancasila sebagai

¹² Pradoyo, *Sekularisasi dalam Polemik*, Jakarta;Pustaka Utama Grafiti, cet.I, 1993, h. 32-38.

ideologi adalah “objektifikasi” dari agama-agama. Pancasila adalah objektifikasi dari Islam, sehingga Pancasila memperoleh dukungan ganda: yaitu ideologi yang mempunyai “*categorical imperative*” dan melalui proses internalisasi ia bisa masuk ke dalam wilayah agama.¹³ apapun agamanya.

Mendalami soal ini, menarik memperhatikan pikiran M. Dawam Rahardjo seorang pemikir Muslim yang mendukung sepenuhnya sekularisme di Indonesia yang mengatakan bahwa Pancasila mengandung unsur “sekularis”. Artinya, negara Republik Indonesia bukanlah negara teokrasi yang berada di bawah pemimpin agama, terutama ulama. Tetapi negara juga bersifat positif terhadap agama, karena negara berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa di mana negara menjamin kebebasan beragama, negara tidak mencampuri urusan agama, tetapi melindungi dan memeliharanya; Negara menyerap nilai-nilai luhur agama, dan negara memberi kemudahan untuk kegiatan-keagamaan.¹⁴

Diterimanya Pancasila sebagai asas dan ideologi negaramerupakan puncak dari pertentangan dan sekaligus merupakan hasil kompromi antara berbagai aliran pemikiran yang ada di Indonesia ketika itu. Fungsi terpenting diterimanya asas Pancasila adalah untuk mendorong Islam sebagai agama mayoritas supaya bersikap toleran terhadap kepercayaan yang lain. Dalam ruang keindonesiaan, Pancasila bisa disebut, mengikuti istilah Robert N. Bellah, sebagai *civil religion*. Sama halnya dengan kata *religion* pada usulan Bellah, sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” tidak menunjukkan pembelaan pada agama tertentu. Tetapi, bermaksud menegaskan bahwa agama-agama di Indonesia berintikan satu Tuhan, yaitu Yang Maha Esa.

Gagasan sekularisasi dan sekularisme di Indonesia sulit dilepaskandari nama Nurcholish Madjid, yang pada tanggal 3 Januari 1970 meluncurkan gagasannya dalam diskusi yang diadakan oleh HMI, PII, GPI, dan Persami, di Menteng Raya 58. Dalam pandangan Nurcholish, sekularisasi mempunyai kaitan erat dengan desakralisasi, karena keduanya mengandung

¹³Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid: Esai-esai Agama, Budaya dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme Transendental* (Bandung: Mizan, 2001) h. 140.

¹⁴M. Dawam Rahardjo, *Intelektual, Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa* (Bandung: Mizan, 1993), h. 480.

nsur pembebasan. Sekularisasi berarti terlepasnya ataupun pembebasan dunia dari pengertian religius. Begitu pula desakralisasi dimaksudkan sebagai penghapusan atau pembebasan dari legitimasi sakral. Pemutlakan transendensi semata-mata kepada Tuhan sebenarnya harus melahirkan “desakralisasi” pandangan terhadap semua selain Tuhan; sebab sakralitas kepada sesuatu selain Tuhan pada hakikatnya adalah syirik, yang merupakan lawan dari tauhid. Maka semua objek yang selama ini dianggap sakral tersebut merupakan objek yang harus didesakralisasikan.

Dengan uraiannya tentang sekularisasi itu, Nurcholish bermaksud *membedakan* bukan memisahkan persoalan-persoalan duniawi dan ukhrawi. Perbedaan ini diperlukan karena ia melihat umat Islam tidak bisa melihat dan memahami persoalan secara proporsional. Para meter yang digunakan untuk memberikan penilaian terhadap nilai-nilai yang “islami” sering kali dikaitkan dengan tradisi yang sudah dianggap mapan. Sehingga Islam disejajarkan dengan tradisi, dan menjadi islami disederajatkan dengan menjadi tradisionalis. Karena itu membela Islam sama dengan membela tradisi, sehingga sering muncul kesan bahwa kekuatan Islam adalah kekuatan tradisi yang bersifat reaksioner. Pandangan-pandangan para pemimpin Islam yang seperti ini menurut Nurcholish telah menyebabkan mereka kurang memberikan respons yang wajar terhadap perkembangan pemikiran yang ada di dunia saat ini.

Lebih jauh Nurcholish menjelaskan tentang ini dengan menyatakan, perbedaan antara “sekularisasi” dan “sekularisme” semakin jelas jika dianalogikan dengan perbedaan antara rasionalisasi dan rasionalisme. Seorang Muslim harus bersikap rasional, tetapi tidak boleh menjadi pendukung rasionalisme. Rasionalisasi adalah suatu metode guna memperoleh pengertian dan penilaian yang tepat tentang suatu masalah dan pemecahannya. Ia menganjurkan setiap orang Muslim bersikap rasional dan melarang untuk tidak menjadi rasionalis.

D. PENUTUP

Inti dari penjelasan sekularisme adalah negara dan agama yang dianggap masing-masing mempunyai kutub yang berbeda tidak bisa disatukan. Masing-masing haruslah berada

pada jalurnya sendiri-sendiri, oleh karena itu selarisme mempunyai arti memisahkan negara dari agama atau pemisahan antara negara dan agama.

Di Indonesia sendiri sekularisme merupakan sebuah bentuk dari sistem pemerintahan lebih tepatnya sebagai negara moderat dengan adanya pancasila di sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan yang maha Esa” yang mana pernyataan tersebut tidak menunjukkan pembelaan pada agama tertentu. Tetapi, bermaksud menegaskan bahwa agama-agamadi Indonesia berintikan satu Tuhan, yaitu Yang Maha Esa. Akan tetapi yang membedakan Indonesia dengan Negara sekuler lainnya adalah dengan adanya departemen yang mengurus persoalan agama, padahal negara sekuler yang murni tidak boleh ikut campur dalam persoalan agama. Agama hanya menjadi wilayah keluarga dan masyarakat.

BIBLIOGRAFI

- Naquib, Al Attas Syed, *Islam dan Sekularisme*, (Bandung:Pustaka, 1981).
- An-Nabhani, Taqiyuddin, *Peraturan Hidup dalam Islam*, (Bogor: Pustaka Tariqul Izzah, 2001)
- Ismail, Faisal, “Tentang Sekular, Sekularisme dan Sekularisasi” dalam *Percikan Pemikiran Islam* (Yogyakarta: Bina Usaha, 1984).
- N. Bellah, Robert, *Beyond Belief (Menemukan Kembali Agama)*, (Jakarta:Paramadina,2000).
- Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid: Esai-esai Agama, Budaya dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme Transendental* (Bandung:Mizan, 2001).
- Pardoyo, *Sekularisasi dalam Polemik*, Jakarta;Pustaka Utama Grafiti, cet.I, 1993,
- Praja,S Juhaya, *Aliran-aliran Filsafat dan Etika*, (Jakarta: Kencana, cet.IV, 2010)
- Qardhawi, Yusuf, *Islam dan Sekularisme*, (Bandung:Pustaka Setia, cet.I, 2006)
- Rahardjo, M. Dawam. *Intelektual, Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa* (Bandung: Mizan, 1993).
- Solihin,M *Perkembangan Pemikiran Filsafat dari Klasik hingga Modern*, Bandung:CV. Pustaka Setia, 2007,

Lembaga Pengkajian dan Penelitian WAMI, *Gerakan Keagamaan dan Pemikiran (Akar Ideologis dan Penyebarannya)*, Jakarta:Al-Ishlahy Press, cet.I, 1995,